

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Organisasi Gerakan Pemuda Ansor merupakan badan otonom dari Nahdhatul Ulama (NU). Hubungan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dengan Nahdlatul Ulama (NU) ialah bahwa Gerakan Pemuda Ansor merupakan badan otonom NU yang dibentuk dan disetujui Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akhirnya mengikat Gerakan Pemuda Ansor untuk tunduk dan setia kepada NU dan menjadikan Ansor sebagai alat perjuangan NU. Setelah NU menjadi partai politik, NU menggunakan Ansor sebagai salah satu wadah kaderisasi politik. Gerakan Pemuda Ansor adalah organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berwatak kerakyatan. Gerakan Pemuda Ansor terbentuk dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah yang berawal dari perbedaan pendapat antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh dan pembinaan kader.

Tidak sedikit dari mereka yang berlatar belakang Ansor menempati posisi-posisi penting bukan hanya pada sektor-sektor yang identik dengan Ansor, misalnya pengurus NU, Birokrat di Kementerian Agama atau pengurus partai politik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan NU, juga pada sektor lainnya dalam kehidupan masyarakat, mulai dari elite di berbagai partai politik, birokrat di kementerian-kementerian, akademisi, aktivis Civil Society Organization, pengusaha.

Ansor bersama dengan induknya NU adalah garda depan dalam melawan kecenderungan menguatnya politik identitas yang mengatasmakan agama, tatkala elemen-elemen lain dari bangsa ini seperti maju-mundur atau bahkan terkesan takut untuk menghadapinya (Alamsyah, et al., 2018 hal: 3).

Pada saat Ansor sudah terbentuk sebagai hasil peleburan dari Da'watus Syubban dan Syubbanul Wathan dengan nama Nahdlatul Syubban, dan kemudian berganti menjadi Ansor Nahdlatul Ulama atau disebut ANO. Sebagai organisasi yang masih sangat muda, ANO pada saat itu menyadari bahwa organisasinya belum sepenuhnya teratur. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil ANO selama dasawarsa 1930-an cenderung diarahkan untuk konsolidasi internal organisasi, khususnya dalam mencari bentuk relasi yang paling tepat dengan Nahdlatul Ulama. Adapun ke luar, langkah ANO masih sebatas pada wacana dan pembangunan pemahaman tentang situasi politik yang berkembang, ANO belum memiliki inisiatif politiknya sendiri dan belum terjun secara langsung dalam kancah politik praktis (Kusuma dalam Alamsyah, et al., 2018 hal: 34).

Pada masa kepengurusan Imran Rosjadi, Gerakan Pemuda Ansor secara intensif membantu NU untuk berkampanye untuk pemilihan umum 1995 melalui instrumen yang dinamakan Korps Mubalig (juru kampanye) yang berkeliling ke daerah-daerah untuk menyebarkan ide-ide partai NU. Sebagai hasilnya pada pemilihan umum 1995 partai NU menempati posisi ke-3 peraih suara terbanyak dan memunculkan anggapan bahwa jabatan dalam Gerakan Pemuda Ansor akan membuka

pintu untuk meraih jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan (Alamsyah, et al., 2018 hal: 56-57).

Kontribusi Gerakan Pemuda Ansor pertama terlihat bagi partai Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu unsur yang aktif memobilisasi masyarakat, terutama pedesaan, untuk memilih partai NU melalui Korps Mubaligh pada saat pemilihan Umum 1955 pada perolehan suara terbanyak ke-3, selain itu Ansor juga menjadi salah satu elemen yang menyediakan kader-kader terbaik bagi partai NU. Hal ini merupakan Partisipasi Politik yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor dalam politik praktis pada waktu itu. Selain itu menjelang pemilu 1971 Gerakan Pemuda Ansor mengadakan Konferensi Besar V pada 1969 yang memberikan sumbangsih signifikan bagi konsolidasi internal tubuh NU, khususnya di kalangan para pemuda (Kusuma dalam Alamsyah, et al., 2018 hal: 152). Sebagaimana terlihat dari hasil Pemilu 1971, konsolidasi yang dilakukan partai NU dengan peranan besar Gerakan Pemuda Ansor ini terbukti membuahkan hasil yang menggembirakan. Perolehan suara Partai NU mencapai 10.213.650 (18,68%), meningkat dibandingkan perolehan suara pada Pemilu 1955 yang hanya 6.955.141 (18,41%) (KPU dalam Alamsyah, et al., 2018 hal: 153).

Peran aktif tokoh Gerakan Pemuda Ansor dalam politik salah satunya ditunjukkan oleh Slamet Effendy Yusuf yang merupakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang terpilih pada Kongres IX, yang juga aktif di Golongan Karya (Golkar), bahkan memegang posisi yang cukup signifikan sebagai Ketua Departemen Pemuda DPP Golkar periode 1988-1993 dan anggota MPR Fraksi Golkar 1988-1997, yang mana selama memimpin Ansor dua periode, karir politiknya di Golkar semakin

mapan, bahkan pada pemilu 1992, Slamet berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Golkar untuk periode 1992-1997 berlanjut sampai tahun 2009 (Kusuma dalam Alamsyah, et al., 2018 hal: 163).

“Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad meminta dan menghimbau agar Gerakan Pemuda Anshor tidak diperbolehkan ikut serta dalam politik praktis sebab anshor memiliki sikap utuh dalam posisi politik, tetapi tidak menutup ruang bagi para kader untuk memiliki pilihan politik atas dirinya sendiri”(M Darwin Fatir 7 November 2018). Hal ini berkaitan dengan fungsi utama Anshor itu sendiri yang mana fungsi dibentuknya Anshor sekarang ini untuk membentengi, melindungi, menjaga keamanan para Ulama NU dengan melibatkan para pemuda didalamnya. Tujuan dari pendidikan politik untuk menciptakan para pemuda yang bertanggung jawab, memiliki pemikiran politik yang membentuk keputusan pribadinya untuk kepentingan publik.

Gerakan Pemuda Anshor di Pangandaran berdiri sejak dimekarkannya kabupaten Pangandaran tahun 2012. Pada awalnya Pangandaran mengikuti kepemimpinan dari Gerakan Pemuda Anshor Pimpinan Cabang Ciamis yang diketuai oleh Dande, setelah dimekarkannya Kabupaten Pangandaran dilaksanakanlah Konferansab sebagai hasilnya terpilihlah Encep Najmudin dari Cigugur Desa Harumandala sebagai Ketua Gerakan Pemuda Anshor Pimpinan Cabang Pangandaran. Semenjak itu Gerakan Pemuda Anshor mulai berkiprah di Pangandaran. Kepengurusan yang terdahulu Encep Najmudin diwaktu pemerintahan Bupati Endjang Naffandy melakukan gerakan yang menonjol ingin memperdakan miras agar tidak dijual bebas

dan menempatkan para pekerja seks komersial di satu tempat. Hal ini merupakan peran serta Gerakan Pemuda Ansor untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintahan Daerah sebagai organisasi yang memiliki kekuatan massa, bahkan bisa mempengaruhi perpolitikan di Kabupaten Pangandaran. Gerakan Pemuda Ansor di setiap kecamatan terbentuk, setelah itu membuat ranting-ranting dengan kegiatan dengan tujuannya ingin mengawal para ajengan NU. Perbedaan Gerakan Pemuda Ansor dengan yang lainnya yaitu lebih mengedepankan ketakdiman dengan tujuan ingin mengawal, melindungi para Ajengan, muhamadiyah lebih kepada ranah pendidikan perbedaannya harokahnya Ansor lebih *samina waatona* kepada pemerintah jika ada hal yang tidak setuju tabayun tidak ada demo-demo ekstrim setelah itu melakukan audensi.

Organisasi Gerakan Pemuda Ansor memiliki hubungan dengan pemerintahan maupun dengan politik. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran menyambut baik atas keputusan Presiden mengenai reshuffle Kementerian Agama, KH. Yaqut Cholil Qoumas Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi (Abdul Aziz, 7 April 2022). Sedangkan di Kabupaten Pangandaran Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata merupakan Mustayar PCNU dan Ansor yang seringkali datang mengikuti acara-acara yang diadakan oleh Ansor maupun oleh NU. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran Encep Najmudin juga masuk dalam partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jabatan Sekretaris DPC PKB, yang mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019 dan akhirnya terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PKB.

Dari kader Ansor terdapat Miftah Mujahid menjadi Dewan fraksi PPP, terdapat juga anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang beridentitas Nahdlatul Ulama yaitu Solehudin dari Fraksi PKB. Masih banyak anggota Gerakan Pemuda Ansor yang terlibat dalam partai politik dan kebanyakan terdapat di partai PKB. Dengan melihat begitu banyaknya orang-orang yang memiliki identitas Ansor yang masuk dalam kegiatan politik membuktikan bahwa Gerakan Pemuda Ansor berperan penting dalam proses politik terutama pemilihan umum khususnya pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran.

Gerakan Pemuda Ansor di kabupaten Pangandaran menekankan untuk anggota organisasi tidak untuk membawa nama Gerakan Pemuda Ansor apabila ingin berpartisipasi dalam politik dan melarang untuk rangkap jabatan dalam kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor dengan ketua partai politik. Dalam pernyataan Encep Najmudin ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pangandaran, “bahwa secara kelembagaan Gerakan Pemuda Ansor, tentunya harus netral jika ada kader yang ingin turut serta dalam pelaksanaan politik praktis dalam pilkada Pangandaran 2020, itu hak individu mereka kalau ingin berpolitik, asal jangan bawa embel-embel Gerakan Pemuda Ansor saja” (Dede, 29 juli 2020).

Setiap kader Ansor dengan hak pribadinya tidak menutup kemungkinan untuk masuk dalam berpartisipasi dalam partai politik, politik praktis dalam menyuarakan hak pilihnya. Dengan adanya NU, Gerakan Pemuda Ansor memiliki hubungan yang erat dengan partai politik Islam melihat dari sejarah NU yang dulunya berhubungan dengan partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PPP (Partai Persatuan

Pembangunan), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan partai politik yang lainnya. Maka kemungkinan besar para kader dan anggota Gerakan Pemuda Ansor akan mendukung dan menyuarakan pilihan pada anggota Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor apabila ada yang mencalonkan diri dalam pemilu, maka hipotesis penulis ialah bahwa anggota dan kader dimobilisasi oleh organisasi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran untuk memilih calon legislatif berdasarkan apa yang diperintahkan oleh para Petinggi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran sesuai kepentingan dan timbal balik dari para calon legislatif yang meminta dukungan. Namun Gerakan Pemuda Ansor pada pemilu 2019 juga menyiapkan kandidat calon legislatif dari dalam organisasi dengan mencalonkan Ketua Gerakan Pemuda Ansor yaitu Ncep Nazmudin yang sukses terpilih dan menjabat sebagai Anggota Dewan Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PKB.

Kader dan anggota Gerakan Pemuda Ansor wilayah Kabupaten Pangandaran selain aktif berorganisasi sebagian dari mereka juga masuk dalam partai politik. Hubungan yang sangat erat dengan Nahdlatul Ulama membuat kader dan anggota Ansor banyak yang memilih masuk dalam partai politik Islam. Maka dengan latar belakang di atas Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran dalam Pemilu Legislatif 2019”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana partisipasi politik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran dalam Pemilu Legislatif 2019?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi politik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran dalam pemilu legislatif 2019.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak peneliti capai ialah diharapkan mampu menjelaskan bagaimana pola partisipasi politik yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran dalam pemilu legislatif 2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat berguna di kemudian hari untuk beberapa pihak yang membutuhkannya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu-ilmu sosial dan politik, khususnya mengenai permasalahan di bidang gerakan partisipasi politik organisasi masyarakat kepemudaan Islam yaitu Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan untuk para akademisi, pemerintah dan lembaga-lembaga yang membutuhkannya.